

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuannya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, jenis dan pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau Identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat Jendral terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran Direktorat jendral terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pemberian bantuan kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak yang rawan putus agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.

a. Tujuan Program Indonesia Pintar

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;

- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi
- 3) Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya
- 4) Meringankan biaya personal pendidikan.

b. Landasan Hukum

Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- 11) Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019
- 12) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif

- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
- 18) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
- 19) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi
- 20) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.666011/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya
- 21) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.666032/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya

- 22) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya
- 23) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2017 Nomor: 023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta revisinya.

c. Prioritas Sasaran Penerima

Sasaran PIP adalah peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- 1) Peserta didik pemilik KIP
- 2) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus. Seperti:
 - a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b) Peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan.
 - d) Peserta didik yang terkena dampak bencana
 - e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara di rumah.
 - f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

- g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

d. Persyaratan Penerima

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

1) Peserta didik pendidikan formal:

- a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah
- b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah

2) Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:

- a) Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya
- b) Terdaftar dalam dapodik satuan pendidikan nonformal

e. Besaran Dana PIP diberikan per peserta didik lembaga kursus dan peatihan, adalah sebagai berikut:

Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diberikan dana sebesar Rp. 1.000,000 selama

mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus.

f. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik diluar program PKK dan PKW, sebagai berikut:

- 1) Peserta didik usia 16 sampai 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2017 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.
- 2) Dinas Pendidikan atau Kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan Pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- 3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi, (2) Kab/Kota, (3) Kecamatan, (4) NPSN/NILEK/NILEM, (5) Nama Lembaga, (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik, (8) Tanggal Lahir, (Nama Ibu Kandung dan (10) Nomor KIP.
- 4) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat pembinaan SMK
- 5) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat pembinaan SMK akan menerbitkan SK

Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.

g. Mekanisme untuk mendapatkan KIP

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/ manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan nonformal.

Persyaratan mendapatkan KIP:

- 1) Memiliki kartu keluarga sejahtera KKS atau
- 2) Sebagai peserta program keluarga harapan (PKH) apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa Identitas KTP/KK/SIM untuk mendapatkan KKS.

h. Penetapan penerima dana/ manfaat PIP

Penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
- 2) Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat

keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dirjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.

- 3) Untuk peserta didik kursus/pelatihan penetapan penerima dana/ manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.

i. Penyaluran Dana PIP

Dana PIP dialurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- 2) Direktorat teknis mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPN) ke KPPN untuk diterbitkan surat perintah pecairan dana (SPPD) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai SPPD ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di Bank/lembaga penyalur
- 4) Direktorat teknis menyampaikan surat perintah pemindahan (SPPN) bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan atau memindah bukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis

penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat teknis dengan bank atau lembaga penyalur.

- 5) Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana atau manfaat PIP
- 6) Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal
- 7) Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/ orang tua/wali

Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan atau rekening sementara (virtual account).

j. Pencairan dana PIP

Pencairan (pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta didik atau penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Rekening tabungan

Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan terlebih dahulu dengan membawa:

- a) Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga

- b) Salahsatu tanda atau identitas pengenalan (KIP/ Kartu pelajar/ Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

k. Kewajiban Peserta Didik Penerima PIP

Peserta didik penerima PIP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana
- 2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun
- 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah
- 4) Menunjukkan kepibadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

l. Pemanfaatan Dana PIP

Program PIP ditunjukkan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Membeli buku dan alat tulis
- 2) Membeli pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas dll)

- 3) Membiayai peserta didik ke sekolah
- 4) Uang saku peserta didik pendidikan formal
- 5) Biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal
- 6) Biaya praktik tambahan atau penambah biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

m. Monitoring Evaluasi

dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PIP, perlu dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan perencanaan PIP dimasa yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal oleh Dinas Pendidikan Kota . Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.

- 1) Monitoring internal SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dibawah pembinaan bersama komite/pengurus lembaga dapat melakukan monitoring untuk mendukung pelaksanaan PIP di tingkat lembaga/sekolah berjalan dengan baik.
- 2) monitoring eksternal Direktorat teknis, dinas pendidikan Kota dan Dikmas, dan dinas pendidikan provinsi dapat melaksanakan monitoring

dan evaluasi secara sampel untuk mendapatkan data dari informasi dari keterlaksanaan atau pencapaian PIP.

2. Motivasi Belajar

Pengertian Motivasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: “Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang dengan tujuan tertentu. Motivasi juga diartikan merupakan usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya” (Depdiknas, 2005: 756).

Menurut MC Donald dalam Sardiman A.M (2007:73) mendefinisikan motivasi adalah “perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Motivasi tumbuh didorong oleh kebutuhan (need) seseorang, seperti perumbuhan menjadi kaya, maka seseorang berusaha mencari penghasilan sebanyak-banyaknya. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. “Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan”

a. Tujuan Motivasi

Menurut ngalim Purwanto (2003:73), tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuan tertentu. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan dimotivasi.

b. Fungsi Motivasi

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak itu sebenarnya di latar belakang oleh sesuatu atau secara umum dinamakan motivasi. Motivasi ini lah yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu kegiatan/pekerjaan. Begitu juga dengan belajar perlukan adanya motivasi. Hasil belajar optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Fungsi motivasi menurut Sardiman A.M (2005:85) ada tiga fungsi, yaitu:

- 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
- 2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai rumusan dan tujuannya.

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa akan menghadapi ujian dengan harapan lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain.

Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usahadan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukan hasil yang baik. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan terutama didasri adanya motivasi. Maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapain prestasi belajarnya.

c. Macam-macam Motivasi

Macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik:

1) Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah adar dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud

dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya.

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak mungkin ahli. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial.

2) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan dipuji oleh temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang

didalamnya ada aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmani seperti misalnya: refleksi, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.

d. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah

Didalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan kaitan itu perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat, dan kadang-kadang juga bisa kurang sesuai. Hal ini guru harus hati-hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik. Sebab mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan perkembangan belajar siswa.

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar:

1) Memberi angka

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya.

2) Hadiah

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak lah selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh hadiah yang diberikan gambar yang terbaik mungkin akan menarik bagi seorang siswa yang tidak memiliki bakat menggambar.

3) Pujian

Pujian ini adalah bentuk *reinforcement* yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik, oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri.

4) Hukuman

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.

5) Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.

3. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan lahir melalui proses yang panjang. Menurut Andersen dkk (2008:186) proses kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Untuk Indonesia rencana 20% keberhasilan, implementasi 60% dan 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi, mengendalikan implementasi berkaitan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan mengurangi resiko kegagalan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dikarenakan masalah-masalah yang kadang tidak ada dalam konsep muncul di lapangan.

Menurut Wibawa dalam M. Hasbullah (2014:92) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk instruksi atau keputusan yang penting. Keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang akan ditangani, tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan proses implementasi.

4. Pengertian Belajar

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Demikian pula perubahan tingkah laku seseorang yang berbeda dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan, dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. (Drs. Slameto, 2009: 2-3).

Dibawah ini teori-teori belajar yaitu:

a. Teori Gestalt

Teori ini dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman, hukum yang berlaku pada pengamatannya adalah sama dengan hukum dalam belajar yaitu :

- 1) Gestalt mempunyai sesuatu yang melebihi jumlah unsur-unsurnya
- 2) Gestalt timbul lebih dahulu daripada bagian-bagiannya.

b. Teori Belajar Menurut J. Bruner

Menurut J. Bruner (2009: 11) “Belajar tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Sebab itu Bruner mempunyai pendapat, alangkah baiknya bila sekolah dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk maju dengan cepat sesuai dengan kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Didalam proses belajar Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan”.

c. Teori belajar menurut R. Gagne

Menurut R. Gagne (2009:13) terhadap masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi, yaitu: “Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku”. Belajar ialah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi.

Dari ke tiga ahli tersebut belajar dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan perubahan yang bersifat menetap dan menyeluruh sebagai hasil dari adanya respon individu terhadap situasi tertentu. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, namun juga

berwujud keterampilan, kecakapan, sikap, tingkah laku, pola pikir, kepribadian dan lain-lain.

a. Prestasi belajar

Menurut Sumadi Suryabrata (2005:175) “Prestasi belajar meliputi perubahan motorik, sehingga prestasi belajar adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai dalam belajar setelah ia melakukan kegiatan belajar”.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang meliputi perubahan tingkah laku (Psikomotorik), penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar

Berhasil atau tidaknya proses belajar seorang individu juga dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam (internal), maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal). Prestasi belajar pada siswa pada hakikatnya merupakan interaksi dari beberapa faktor. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat penting dalam rangka memantau siswa dalam mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar:

- 1). Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor individual.

2). Faktor dari luar individu yang kita sebut faktor sosial. Yang termasuk dalam faktor individual antara lain: faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan motivasi dan faktor pribadi. Sedangkan yang dimaksud faktor sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumah, guru dan cara mengajarnya, alat yang digunakan dalam belajar mengajarnya, lingkungan dan kesempatan yang tersedia.

c. Keseriusan belajar

Keseriusan belajar adalah usaha pembelajaran akan sesuatu dengan kesungguhan dan hasil berusaha mengatasi rintangan yang ditemui selama proses tersebut. Dalam belajar terkadang mempunyai rasa malas, itu merupakan salah satu hal yang dianggap biasa oleh para pelajar namun hal itu dapat pula menyebabkan pelajar menjadi pelajar kondusif. Masa menjadi pelajar merupakan masa yang penting untuk menentukan masa depan. Apabila belajar saja masih terdapat saja rasa malas, itu berarti kita juga malas menjadi sukses, sebenarnya kemalasan ini dapat diatasi dengan belajar.

http://nina-nurse.blogspot.com/2013/01/keseriusan-belajar_31.html?m=1

d. Kreativitas

Kreativitas (Drs. Slameto, (2009:145-146) ”Merupakan istilah yang banyak digunakan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Pada umumnya orang menghubungkan kreativitas

dengan dengan produk-produk kreasi. Dengan perkataan lain, produk-produk kreasi itu merupakan hal yang penting untuk menilai kreativitas”.

Pada hakikatnya, pengertian kreatif berhubungan dengan penemuana sesuatu, mengenai hal-hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Secara tradisional kreativitas dibatasi sebagai mewujudkan sesuatu yang baru dalam kenyataan. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku.

Perumusan pengertian, kreativitas yang telah disebutkan diatas adalah perumusan yang tradisional. Menurut Moreno dalam Slameto (2013: 146), yang penting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya.

Pembahasan tentang kreativitas sering dihubungkan dengan kecerdasan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa siswa yang tingkat kecerdasannya (IQ) tinggi berbeda-beda kreativitasnya. Dengan perkataan lain, siswa yang tinggi tingkat kecerdasannya tidak selalu menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi, dan banyak siswa yang tinggi tingkat kreativitasnya tidak selalu tinggi tingkat kecerdasannya.

e. Disiplin belajar

Masykur Arif Rahman (2011:64) mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline” yang mengandung beberapa arti diantaranya adalah pengendalian diri, membentuk karakter yang bermoral, memperbaiki dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata tertib untuk mengukur tingkah laku. Disiplin juga merupakan upaya untuk membentuk tingkah laku sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan diharapkan. Terkait itu lembaga yang mempunyai tata tertib jelas bermaksud mendisiplinkan tutor dan peserta didik mencapai tingkat tertinggi dalam prestasi belajar mengajar.

<http://eprints.uny.ac.id>

f. Ciri-ciri Individu Kreatif

Sund dalam buku Slameto (2007:147), menyatakan bahwa individu dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar
- 2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru
- 3) Panjang akal
- 4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti
- 5) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan
- 6) Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas
- 7) Berfikir fleksibel
- 8) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak.
- 9) Kemampuan membuat analisis dan sintesis
- 10) Memiliki semangat bertanya serta meneliti

11) Memiliki daya abstraksi yang cukup baik

12) Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.

5. Pengertian Pelatihan

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “*training*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah akar kata “*training*” adalah “*train*”, yang berarti: (1) memberi pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*), (2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki, (3) persiapan, dan (4) praktik.

Menurut Simamora (1995:287) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam Intruksi Presiden No.15 tahun 1974, pengertian pelatihan dirumuskan sebagai berikut:

“Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori”.

Istilah pelatihan biasa dihubungkan dengan pendidikan. Ini terutama karena secara konseptual pelatihan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Meskipun demikian secara khusus pelatihan dapat dibedakan dari pendidikan. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005, dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara sederhana UNESCO mendefinisikan pendidikan sebagai “proses belajar mengajar yang terorganisir dan terus menerus yang dirancang untuk mengkomunikasikan perpaduan pengetahuan, skill, dan pemahaman yang bernilai, untuk seluruh aktivitas hidup” (dalam Jarvis 1990, hal 105). Kata kunci yang membedakan antara pendidikan dan pembelajaran, adalah “proses belajar mengajar yang terorganisir dan terus menerus”. Hal ini mengimplikasikan adanya keterlibatan semacam pengajar dan mungkin juga institusi, walaupun pendidikan tersebut bisa saja melalui teks ataupun program komputer.

Sistem pendidikan dipandang sebagai perangkat negara, yang fungsinya untuk menciptakan masyarakat (pekerja) yang memiliki kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan merupakan usaha untuk memproduksi klasifikasi sosial ekonomi (lihat Boudieu and Passeron 1990, Blowles and Gintis 1976, Young 1998). Berdasarkan pandangan tersebut, makna pendidikan tentu saja tidak bisa dipahami secara individual maupun psikologis, tetapi perlu adanya pemahaman berdasarkan konteks sosialnya yang lebih luas.

Konteks yang dimaksud tidak hanya meliputi institusi pendidikan, institusi pendukung lainnya, maupun lingkungan dimana pendidikan tersebut dilaksanakan, melainkan juga meliputi pertimbangan terhadap posisi hubungan, maupun keterkaitan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memiliki implikasi politis, ekonomis, teknologi, dan sosial, serta harus tetap menjadi konsep yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu biasanya pelatihan diasosiasikan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Namun demikian, pelatihan bisa juga dilihat sebagai elemen khusus atau keluaran dari suatu proses pendidikan yang lebih umum. Peter mengemukakan, “Konsep pelatihan bisa diterapkan ketika (1) ada sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai, (2) latihan diperlukan untuk menguasai keterampilan tersebut, (3) hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori”.

Definisi diatas memberikan penekanan pada “penguasaan” tugas atau peran dan pada kebutuhan untuk melakukan pengulangan latihan hingga bisa melakukan sendiri, dan juga menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan relatif spontan dan tanpa dimotivasi pengetahuan dan pemahaman.

a. Tujuan pelatihan

Tujuan pelatihan itu tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan dan keterampilan saja, melainkan juga untuk mengembangkan bakat. Definisi pelatihan dikemukakan oleh

Michael J. Jucius diatas bahwa pelatihan bertujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan. Atas dasar ini Moekijat (1981) mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah untuk:

- 1) Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih efektif.
- 2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional
- 3) Untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerjasama.

Secara terperinci tujuan pelatihan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan warga masyarakat dalam mengidentifikasi potensi-potensi diri dan potensi masyarakat sehingga dapat dikembangkan dan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan usaha.
- 2) Untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan anggota masyarakat sehingga mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- 3) Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.

- 4) Untuk mengembangkan sikap sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja dan kerjasama.
- 5) Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat lebih kreatif, inovatif dalam mengembangkan usahanya.
- 6) Mampu mengembangkan dan memajukan lembaga sebagai wadah dalam pengembangan usaha.

b. Prinsip-prinsip Pelatihan

Prinsip-prinsip umum agar pelatihan dapat berhasil adalah sebagai berikut:

1) Prinsip perbedaan individu

Perbedaan-perbedaan individu dalam latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, minat, bakat, dan kepribadian harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pelatihan.

2) Prinsip motivasi

Motivasi dapat berupa pekerjaan atau kesempatan berusaha, penghasilan, kenaikan pangkat atau jabatan, dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup.

3) Prinsip belajar

Belajar harus dimulai dari yang mudah menuju kepada yang sulit, atau dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui.

4) Prinsip metode pelatihan

Terdapat berbagai metode pelatihan, dan tidak ada satu pun metode pelatihan yang dapat digunakan untuk semua jenis pelatihan. Untuk itu perlu dicarikan metode pelatihan yang cocok untuk suatu pelatihan.

c. Landasan Pelatihan

Terdapat beberapa landasan yang mengukuhkan eksistensi pelatihan. Landasan-landasan dimaksud adalah:

1) Landasan Filosofis

Pelatihan merupakan wahana formal yang berperan sebagai instrumen yang menunjang pembangunan dalam mencapai masyarakat yang maju, tangguh, mandiri, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian pelatihan harus didasarkan pada sistem nilai yang diakui dan terarah pada penyediaan dan tenaga yang berkualitas agar mampu mengemban tugas dan melaksanakan perannya dalam organisasi atau masyarakat.

2) Landasan Humanistik

Pelatihan didasarkan pada pandangan yang menitik beratkan pada kebebasan, nilai-nilai, kebaikan, harga diri, dan kepribadian yang utuh.

3) Landasan psikologis

Dalam pandangan psikologi, karakteristik manusia dapat dijabarkan kedalam seperangkat tingkah laku. Empat pandangan psikologi yang mendasari pelatihan, yaitu psikologi pelatihan, psikologi siberentik, desain sistem, dan psikologi behavioristik. Psikologi pelatihan menitikberatkan pada analisis tugas dan rancangan pelatihan yang mencakup berbagai komponen yang kompleks. Psikologi sibernetik memusatkan perhatian pada sistem balikan yang dinamis dan pengaturan sendiri kegiatan pelatihan. Disain sistem menutamakan analisis sistem pelatihan. Psikologi behavioristik menekankan pada demonstrasi dan pelatihan bertahap.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama pada penelitian ini. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati R (2016) dengan judul “ Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Siswa Miskin di SMA N 1 Masalle Kabupaten Enrekang”. Berdsarakan hasil penelitian dilapangan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA N 1 Masalle Kabupaten Enrekang yaitu dampak positif, hal ini sangat membantu penerimaannya dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya agar menunjang proses belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar lainnya, kedisiplinan serta kerajinannya untuk tetap bersekolah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amira Fazilah (Universitas Tanjung Pura Pontianak Tahun 2016) dengan judul “Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Di Smp Negeri 9 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) hasil penelitian menunjukkan Secara khusus di SMP Negeri 9 Sungai Raya berdasarkan hasil dilapangan sasaran penerimanya banyak siswa yang ekonominya rendah tidak mendapat manfaat PIP karena tidak memiliki Kartu perlindungan sosial (KPS) sedangkan siswa yang tidak berasal dari keluarga ekonomi rendah mendapatkan dana PIP. Pengambilan dana dilakukan oleh peserta didik bersama orang tua atau dengan cara kolektif, Pelaksanaan PIP yang terjadi di SMP Negeri 9 Sungai Raya bermacam-macam merekamemanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan yang mereka hadapi, ada yang memanfaatkan dengan benar dan semestinya yang telah diatur pemerintahayang menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Progam Indonesia Pintar, bedanya penulis memfokuskan pada KIP dengan melihat

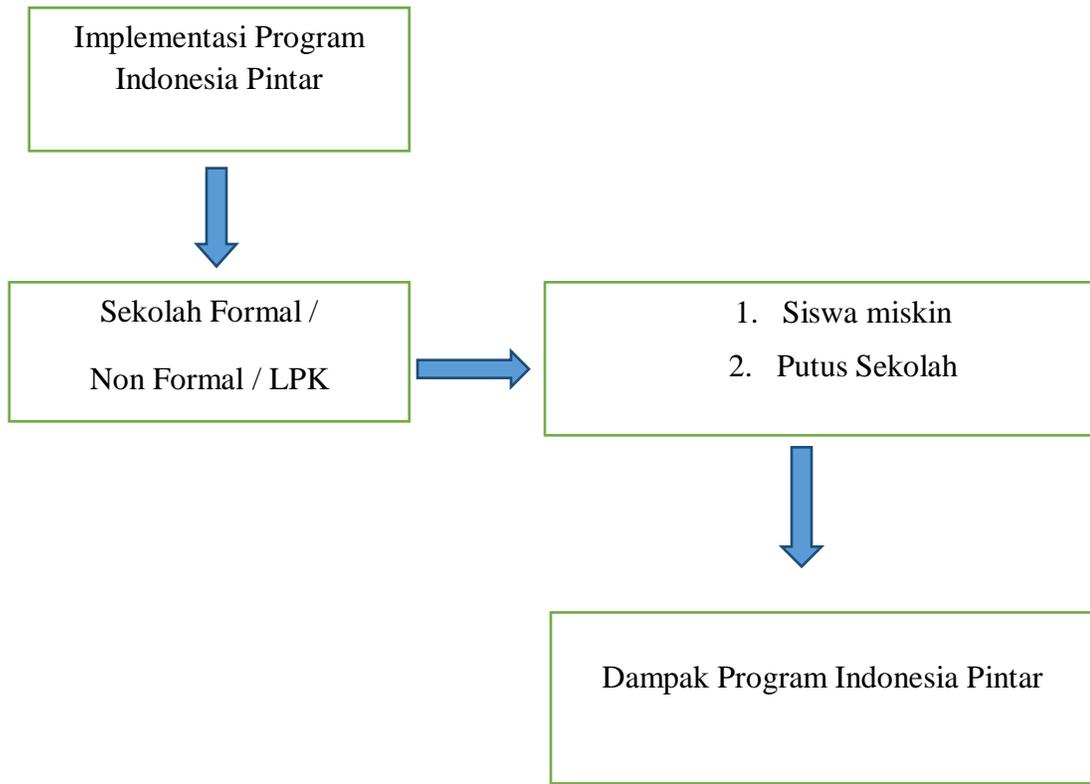
pemanfaatan penggunaan dana, sedangkan penelitian ini membahas secara umum pelaksanaan Program Indonesia Pintar di sekolah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muyassaroh (2017) dengan judul “ Pengaruh Kartu Indonesia Pintar Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas XI di SMKN 2 Pamekasan Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dari hasil penelitian ini dengan menghubungkan permasalahan yang pertama dengan kedua sebagai sebab akibat teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penyebaran angket tertutup dan dokumentasi. Sedangkan subjek penelitian ini diambil dari seluruh populasi siswa kelas XI yang memperoleh KIP, dengan 70 responden. Untuk teknik analisis data menggunakan rumus *regresi linier*. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: nilai rata-rata Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah 32.21 dan nilai rata-rata Peningkatan Motivasi sebesar 28.86. setelah semua data dimasukkan dalam *regresilinier*. Maka diperoleh nilai F hitung tabel dengan $dk_1 = k-1$ dan $dk_2 = n-k$, sehingga menghasilkan harga F tabel 3,99. Berdasarkan perhitungan tersebut, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel ($49.534 > 3,99$). Jadi hipotesis kerja (H_a) yaitu ada pengaruh Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Agama Islam Di SMKN2 Pamekasan diterima dan hipotesis nihil (H_0) ditolak.

C. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua, konsep pendidikan untuk semua berarti mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu mendapat layanan pendidikan. Hak memperoleh layanan pendidikan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu setiap orang berhak atas pengajaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program pada beasiswa pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yang merupakan kelanjutan dari BSM. Program Indonesia Pintar menjangkau pendidikan nonformal dan formal. Program Indonesia Pintar ini mencakup sekolah, direktorat teknis, lembaga penyalur dan dinas pendidikan kota. Kartu Indonesia Pintar ini di distribusikan kepada masyarakat yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar. Salah satu provinsi yang melaksanakan Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2018/2019 peneliti mengambil tempat di LKP Yuwita. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:



Gambar : 1.1 kerangka berpikir.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, rumusan masalah, dan kerangka berpikir maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di LKP Yuwita ?
2. Bagaimana dampak kepemilikan kepemilikan Program Indonesia Pintar di LKP Yuwita ?